



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan

Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama	Jabatan	Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1	Ahmad Nur Hidayat	Ketua KPU Provinsi Jawa Barat	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Hedi Ardia	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	
3	Abdullah Sapi'i	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	
4	Adie Saputro	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	
5	Aneu Nursifah	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	
6	Hari Nazarudin	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	
7	Ummi Wahyuni	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	
8	Eko Iswantoro	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9	Hedi Ardia	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Tim Pertimbangan
10	Eko Iswantoro	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat	
11	Yunike Puspita	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat	

12	Yunike Puspita	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13	Karlina Sariningsih	Plt. Kepala Subbagian Keuangan KPU Provinsi Jawa Barat	Tim Penghubung Penyedia Informasi Subbagian Keuangan
14	Lisa Andriyani	Verifikator Keuangan KPU Provinsi Jawa Barat	
15	Tarsono	Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat	Tim Penghubung Penyedia Informasi Subbagian Umum dan Logistik
16	Siti Aisyah	Penyusun Data dan Dokumentasi Sarana Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat	
17	Gemayel Paulus Aruan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat	Tim Penghubung Penyedia Informasi Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
18	Nanang Suryawibawa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama KPU Provinsi Jawa Barat	
19	Hasanuddin Ismail	Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Tim Penghubung Penyedia Informasi Subbagian Hukum
20	M. Tofan Yuda Saputra	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	
21	Dini Lestari	Kepala Subbagian Perencanaan KPU Provinsi Jawa Barat	Tim Penghubung Penyedia Informasi Subbagian Perencanaan
22	Ratih Purnamasari	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan KPU Provinsi Jawa Barat	

23	Ramdani	Kepala Subbagian Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat	Tim Penghubung Penyedia Informasi Subbagian Data dan Informasi
24	Roban Syamsul Jamal	Analisis Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat	
25	Norhina Kurniawaty	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Barat	
26	Arief Triwibowo	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur KPU Provinsi Jawa Barat	
27	Fahmi Kamal	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat	
28	Mira Puspasari	Arsiparis Mahir KPU Provinsi Jawa Barat	
29	Muhammad Revandi	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi KPU Provinsi Jawa Barat	Desk Pelayanan
30	Edwin Muhamad Priyatna	Pengelola Layanan Operasional KPU Provinsi Jawa Barat	
31	Syahril Aulia Rahman	Tenaga Administrasi KPU Provinsi Jawa Barat	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Sophia Kurniasari Purba

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

